



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SURABAYA
UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUS HEBI DJUNiantoro
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 718675

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **5.650.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/84 m2 di KAB / KOTA SIDAARJO, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **490.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8L HYBIRD A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. MOTOR, VESPA VESPA SPRINT (150 CC) Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **450.000.000**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **197.417.660**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **6.787.417.660**

III. HUTANG **Rp.** **1.525.113.048**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **5.262.304.612**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.